

PROFIL SOSIAL EKONOMI DAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA TAHUN 2012

SOCIOECONOMICS AND POVERTY PROFILES OF CITIES AND RESIDENCIES IN SUMATERA ISLAND 2012

Eka Ramadhansyah¹, Fajar Restuhadi², Jumatri Yusri²

Fakultas Pertanian Universitas Riau
Ekaramadhansyah49@gmail.com/085355904949

Abstract

One of the most significant current discussions in development country is poverty, including in Indonesia. Indonesia is one of the most populous in the worlds with 237.6 million people in 2010, where 76.93 % of poverty are concentrated in Java (55.33%) and Sumatra (21.6%). This paper attempted to create profiling poverty of 151 residences and cities in Sumatera. The poverty characteristics included in the profiling are: level of education, manpower distribution, expenditures per capita, health, housing facilities, and government's poverty eradication programs. Data resources are from Badan Pusat Statistik (BPS). The data were analyzed by principle component analysis (PCA) and Hierarchical Data Analysis. Factor analysis produced as many as 32 variables as the main components, adequate for further analysis as 'key factors' for social economic characteristic profile of residences and cities in Sumatera. These main components demonstrated the adequate values of KMO, MSA, and *Bartlett's Test of Sphericity*.

Following the result from Factor Analysis to obtain the important factors of poverty, the method of hierarchical cluster analysis was, further, used to classify the profiles of 108 residences and cities in Sumatera. The results of cluster analysis with 5 interesting clusters of poverty profile of socio-economic indicators show that Cluster 1 comprises of 7 residences with similar characteristic of level of education and manpower distribution. Cluster 2 includes 9 residences with similar level of education and expenditures per capita. Cluster 3 consists of 36 residences and 2 cities with similar manpower distribution and expenditures per capita patterns. Cluster 4 comprises of 23 residences and 3 cities showing its own distinct characteristics in their similarity patterns of expenditures per capita and housing facilities. Then, the cluster 5 consists of 2 residences and 27 cities showing the similar patterns in level of education and housing facilities.

Keywords: economic social, poverty, factor analysis, cluster analysis.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat multidimensi karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga upaya

untuk memecahkan masalah kemiskinan tidak mudah. Perdebatan kemiskinan sering kali diawali dengan konsep kemiskinan absolut (mutlak) dan kemiskinan relatif. Perbedaan dasar dari

1. Mahasiswa Pertanian Universitas Riau
2. Dosen Pembimbing Pertanian Universitas Riau

konsep ini adalah dari konsep fisiologis dan sosial kemiskinan. Perdebatan tentang konsep kemiskinan menjadi salah satu yang menarik, terutama dalam cara pengukuran kemiskinan. Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Sebaran kemiskinan nasional penduduk miskin lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa (55,33%) dan Sumatera (21,6%), diikuti Pulau Sulawesi (7,15%), Bali dan Nusa Tenggara (6,90%), Maluku dan Papua (5,69%) serta Pulau Kalimantan (3,26%). Melihat tingkat dan sebaran kemiskinan yang bervariasi di masing-masing Pulau di Indonesia, maka efektivitas program pengentasan kemiskinan tidak dapat lepas dari peranan aktif pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pulau Sumatera adalah pulau kedua terpadat setelah Pulau Jawa, luas wilayah 50.630.931 km² dan jumlah penduduk 56.483.922 jiwa. Penduduk terpadat berada di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 12.982.204 jiwa (BPS,2010).

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menganalisis profil sosial ekonomi dan kemiskinan kabupaten/kota di Pulau Sumatera (2) Menganalisis kelompok (cluster) kabupaten/kota menurut karakteristik sosial ekonomi dan kemiskinan di Pulau Sumatera.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru dengan menganalisis data dan informasi kemiskinan tahun 2012 untuk Pulau Sumatera. Penelitian ini berlangsung dari Bulan Juli 2014 sampai

Bulan Desember 2014. Data dianalisis menggunakan metode analisis faktor dan analisis kelompok, dengan bantuan *software cluster, treeview* dan SPSS 19.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyeleksian Data

Variabel kemiskinan ada 44 variabel yaitu : 1.jumlah penduduk miskin, 2. persentase penduduk miskin, 3.indeks kedalaman kemiskinan, 4.indeks keparahan kemiskinan, 5.garis kemiskian, variabel kondisi tingkat pendidikan kepala rumah tangga, yang terdiri dari 6. tidak mempunyai ijazah, 7.mempunyai ijazah SD atau SLTP, 8.mempunyai ijazah SLTA, 9.Angka Melek Huruf (AMH) 15 sampai 24 tahun, 10.AMH 15 sampai 55 tahun, 11.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 sampai 12 tahun, 12.APS 13 sampai 15 tahun, variabel status pekerjaan usia >15 terdiri dari 13.tidak bekerja, 14.bekerja di sektor informal, 15.bekerja di sektor formal, 16.bekerja di sektor pertanian, 17.bekerja bukan di sektor pertanian, 18.pengeluaran perkapita/bulan untuk makan penduduk miskin, 19.pengeluaran perkapita/bulan untuk makan penduduk tidak miskin, 20.pengeluaran perkapita/bulan untuk makan penduduk miskin+tidak miskin, variabel kesehatan ibu dan balita terdiri dari 21.pengguna alat KB, 22.pertolongan persalinan pertama oleh tenaga kesehatan, 23.pertolongan persalinan terakhir oleh tenaga kesehatan, 24.imunisasi BCG, 25.imunisasi DPT, 26.imunisasi polio, 27. imunisasi campak/morbili, 28.imunisasi hepatitis B, 29.luas lantai ≤ 8 m², 30.luas lantai 8 m² ≤ 15 m², 31.luas lantai >15 m², 32.variabel rumah tangga miskin pengguna air bersih, 33.rumah tangga tidak miskin pengguna air bersih, 34.rumah tangga miskin+tidak miskin pengguna air bersih, 35.rumah tangga miskin pengguna jamban sendiri/bersama, 36.rumah tangga tidak miskin pengguna jamban sendiri/bersama, 37.rumah tangga

miskin+tidak miskin pengguna jamban sendiri/bersama, 38.Jamkesmas, 39.kartu sehat, 40.surat miskin, 41lainnya, 42.rutan penerima raskin, 43.rata-rata raskin, 44.rata-rata harga.

Data 44 variabel tersebut diseleksi berdasarkan kelengkapan dan kemampuan dalam menjelaskan karakteristik sosial ekonomi dan kemiskinan dengan microsoft excel. Hasil seleksi menemukan ada 9 variabel yang tidak lengkap yaitu variabel bekerja di sektor formal, variabel luas lantai $\leq 8 \text{ m}^2$, variabel luas lantai $> 15 \text{ m}^2$, variabel kartu sehat, variabel surat miskin, lainnya, variabel rutan penerima raskin, rata-rata raskin, variabel rata-rata harga.

Sehingga tinggal 35 variabel, namun ada 2 variabel tidak memadai untuk dianalisis dengan *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO) karena nilai KMO dan MSA $< 0,5$. Variabel tersebut ialah variabel garis kemiskinan dan variabel mempunyai ijazah SD atau SLTP.

Data 33 variabel selanjutnya diekstraksi dengan tujuan untuk melihat *factor loading*, jika nilai *factor loading* $< 0,5$ variabel tidak dipakai. Dari 33 variabel tadi terdapat satu yang Tabel 1. KMO dan Bartlett's Test

mempunyai nilai factor loading 0,5 yaitu variabel Jamkesmas.

Akhirnya 32 variabel diteliti dan direduksi menjadi 8 faktor sebagai komponen utama yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut sebagai faktor utama penciri profil kemiskinan kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

3.2. Analisis Faktor

Variabel yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik sosial ekonomi dan kemiskinan kabupaten/kota di Pulau Sumatera adalah variabel yang memiliki KMO 0.788 dan MSA yang bernilai $\geq 0,5$.

Nilai KMO pada 33 variabel adalah 0.788 dan MSA $\geq 0,5$ (Santoso, 2014), dengan demikian 33 variabel telah memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Dimana nilai *Bartlett's Test of Sphericity* sebesar 6873.182 dan signifikan 0.000 dengan begitu telah memenuhi asumsi saling berkorelasi karena nilai Sig. 0.000 kurang dari $\alpha 0,05$. Nilai KMO $> 0,5$ dan nilai *Bartlett's test of Sphericity* 6873.182 dan signifikan 0 sehingga analisis faktor tepat atau sesuai digunakan.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,788
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	6873,182
	df	528
	Sig.	,000

Sumber: data olahan, 2014

Hasil analisis faktor 33 variabel diekstraksi dengan metode rotasi varimax. Dari metode rotasi varimax diperoleh 8 faktor utama sebagai solusi dari analisis faktor dengan eigenvalues diatas 1 dan nilai kumulatif eigenvalues 78,869 persen.

Nilai kumulatif eigenvalues 78,869 persen menunjukkan bahwa total varians atau informasi yang dapat digali dari 8 faktor yang terbentuk adalah sebesar 78,869 persen.

Tabel 2. Faktor Utama Karakteristik Sosial Ekonomi Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Rotated Component Matrix ^a								
Kode	Component							
	1	2	3	4	5	6	7	8
x34	,884	,109	,120	-,071	,201	,043	,175	,203
x33	,882	,106	,111	-,037	,199	,057	,171	,189
x18	-,800	-,126	-,364	,150	,131	-,159	-,162	,038
x19	-,799	-,121	-,377	,220	,133	-,144	-,158	,051
x32	,795	,174	,143	,048	,253	-,029	,199	,299
x17	-,708	-,153	-,357	,144	,069	-,127	-,107	,096
x24	,122	,944	,089	,041	,052	,113	,055	,000
x25	,045	,933	,069	,047	,081	,057	,007	-,053
x23	,088	,928	,097	,026	,066	,099	,010	,050
x27	,157	,906	,074	,031	,069	,051	,058	,049
x26	,112	,842	,038	,018	,039	,006	,106	,085
x29	,291	,122	,810	-,120	,190	,069	,039	,075
x30	,341	,023	,802	-,210	,130	,119	,153	-,013
x31	,177	,098	,695	-,089	,007	,072	,028	,127
x16	,517	,108	,590	-,091	,240	,115	,167	-,172
x15	-,508	-,074	-,569	,066	-,156	-,108	-,523	,104
x3	-,121	,061	-,121	,967	,031	,003	-,018	,039
x4	-,076	,066	-,101	,946	,006	-,004	,001	,015
x2	-,218	,034	-,166	,921	,080	,018	-,052	,047
x21	,117	,134	,506	-,007	,725	,114	,149	,030
x22	,122	,162	,460	-,018	,715	,139	,160	-,001
x11	,032	,080	-,060	,065	,711	,161	-,136	-,022
x9	,093	,171	-,091	-,016	-,124	,790	,312	,070
x6	-,120	-,040	-,298	-,050	-,418	-,719	,054	-,106
x10	,152	,106	,210	-,214	,196	,689	,102	,312
x12	-,015	,071	,103	,233	,279	,546	-,092	-,337
x8	,210	,054	,462	,078	,394	,502	-,097	-,188
x13	,232	,017	,256	-,005	-,068	,074	,871	,043
x14	-,464	,003	-,428	,093	,025	-,104	-,695	-,030
x28	,199	,291	-,205	-,010	,070	,056	,509	-,050
x1	,154	,005	,117	,390	-,089	,020	-,029	,610
x20	,331	,188	,039	-,177	-,013	,144	-,041	,516
x35	-,461	-,050	-,132	,180	,343	,041	,079	,480

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 10 iterations.

Sumber: data olahan, 2014

Variabel-variabel dikelompokkan ke dalam faktor dijelaskan dalam analisis *rotated component matrix*. Factor loading yang terbesar pada setiap komponen menjadi variabel yang termasuk dalam faktor utama. Nilai *factor loading* <0,5 dihapuskan. Hasil factor loading pada 8

faktor utama yang dihasilkan dari hasil ekstraksi dengan metode rotasi varimax ditampilkan pada Tabel 2. Warna abu-abu adalah factor loading, setelah dirotasi varimax dapat diketahui anggota variabel-variabel pada 8 faktor utama dan (38)variabel Jamkesmas tidak masuk

faktor utama karena nilai *factor loading* <0,5.

Akhirnya data yang diperoleh menjadi 32 variabel yang diteliti. Dari 32 variabel terdapat 8 faktor sebagai komponen utama yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut sebagai faktor utama penciri profil kemiskinan kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

1. Faktor 1 dengan variabel-variabel utama adalah pengeluaran perkapita/bulan untuk makan penduduk miskin, pengeluaran perkapita/bulan untuk makan penduduk tidak miskin, pengeluaran perkapita/bulan untuk makan penduduk miskin ditambah tidak miskin, rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama, rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama, dan rumah tangga miskin ditambah tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama.
2. Faktor 2 dengan variabel-variabel utama adalah balita yang mendapatkan imunisasi BCG, balita yang mendapatkan imunisasi DPT, balita yang mendapatkan imunisasi polio, balita yang mendapatkan imunisasi campak/morbili, dan balita yang mendapatkan imunisasi hepatitis B.
3. Faktor 3 dengan variabel-variabel utama adalah penduduk miskin berumur ≥ 15 tahun yang bekerja di sektor pertanian, penduduk miskin berumur ≥ 15 tahun yang bekerja bukan di sektor pertanian, rumah tangga miskin yang pengguna air bersih untuk minum, rumah tangga tidak miskin yang pengguna air bersih untuk minum, dan rumah tangga miskin ditambah tidak miskin yang pengguna air bersih untuk minum.
4. Faktor 4 variabel-variabel utama ialah persentase penduduk miskin, (P1)

kedalaman kemiskinan, dan (P2) keparahan kemiskinan.

5. Faktor 5 dengan variabel-variabel utama adalah angka partisipasi sekolah 7 sampai 12 tahun, penolong persalinan pertama oleh tenaga kesehatan, dan penolong persalinan terakhir oleh tenaga kesehatan.
6. Faktor 6 dengan variabel-variabel utama adalah tidak mempunyai ijazah, mempunyai ijazah minimal SLTA, angka melek huruf 15 sampai 24 tahun, angka melek huruf 15 sampai 55 tahun, dan angka partisipasi sekolah 13 sampai 15 tahun.
7. Faktor 7 dengan variabel-variabel utama adalah tidak bekerja, bekerja di sektor informal, dan luas lantai perkapita.
8. Faktor 8 variabel-variabel utama adalah jumlah penduduk miskin, dan pengguna alat KB.

3.3. Analisis Kelompok

Data dan informasi kemiskinan tahun 2012 dianalisis dengan metoda analisis kelompok dengan tujuan menemukan kelompok alami dari satu kumpulan yang memiliki kemiripan. sehingga dapat dimanfaatkan untuk membentuk profil kemiskinan kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera mempunyai 151 kabupaten/kota tetapi yang memiliki kemiripan yang sama ada 108 kabupaten/kota.

Kelompok 1 meliputi Kabupaten Samosir, Dairi, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Toba Samosir, Hubang Hasundutan, dan Tapanuli Utara, menunjukkan karakteristik yang sama pada aspek ketenagakerjaan dan aspek pendidikan. Kelompok 2 Kabupaten Empat Lawang, OKU Selatan, Nias Selatan, Bengkulu Utara, Nias Barat, Nias, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Indragiri Hilir, menunjukkan karakteristik yang sama pada aspek pendidikan dan aspek

ekonomi. Kelompok 3 meliputi kabupaten/kota yaitu Kabupaten Seluma, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Ogan Komering Ilir, Pesawaran, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Musi Banyuasin, WayKanan, Tanggamus, Lampung Barat, Lahat, Muara Enim, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, kota Gunung sitoli, Aceh Jaya, Bener Meriah, Aceh Tengah, Kepahiang, Kota Subulussalam, Simeulue, Nagan Raya, Nias Utara, Kaur, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Kepulauan Meranti, Mukomuko, menunjukkan karakteristik yang sama pada aspek ekonomi dan aspek ketenagakerjaan. Kelompok 4 meliputi 3 kota dan 13 kabupaten yaitu Kota Sawah Lunto, Pagar Alam dan Sungai Penuh, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kerinci, Agam, Tanah Datar, Bungo, Belitung Timur, Muaro Jambi, Kepulauan Anambas, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Natuna, Bangka Barat, menunjukkan karakteristik yang sama pada aspek ekonomi dan fasilitas perumahan. Kelompok 5 meliputi Kabupaten Karimun, Bintan, Kota Pangkal Pinang, Dumai, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Metro, Binjai, Padang Panjang, Solok, Lubuk Linggau, Bengkulu, Lhokseumawe, Langsa, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Banda Aceh, Sibolga, Batam, Padang, Medan, Jambi, Bandar Lampung, Palembang, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Tanjung Balai, Prabumulih, dan Sabang, menunjukkan karakteristik yang sama pada aspek pendidikan dan ekonomi.

Kemiskinan tidak lepas dari banyak penyebab, penyebab terjadinya kemiskinan adalah pengangguran. Saunders dalam Abdullah, Alisjahbana dan Effendi (2002) menyebutkan bahwa pada tahun 1972-1973 sekitar 16,6 persen dari penduduk yang tidak bekerja hidup di bawah garis kemiskinan sementara,

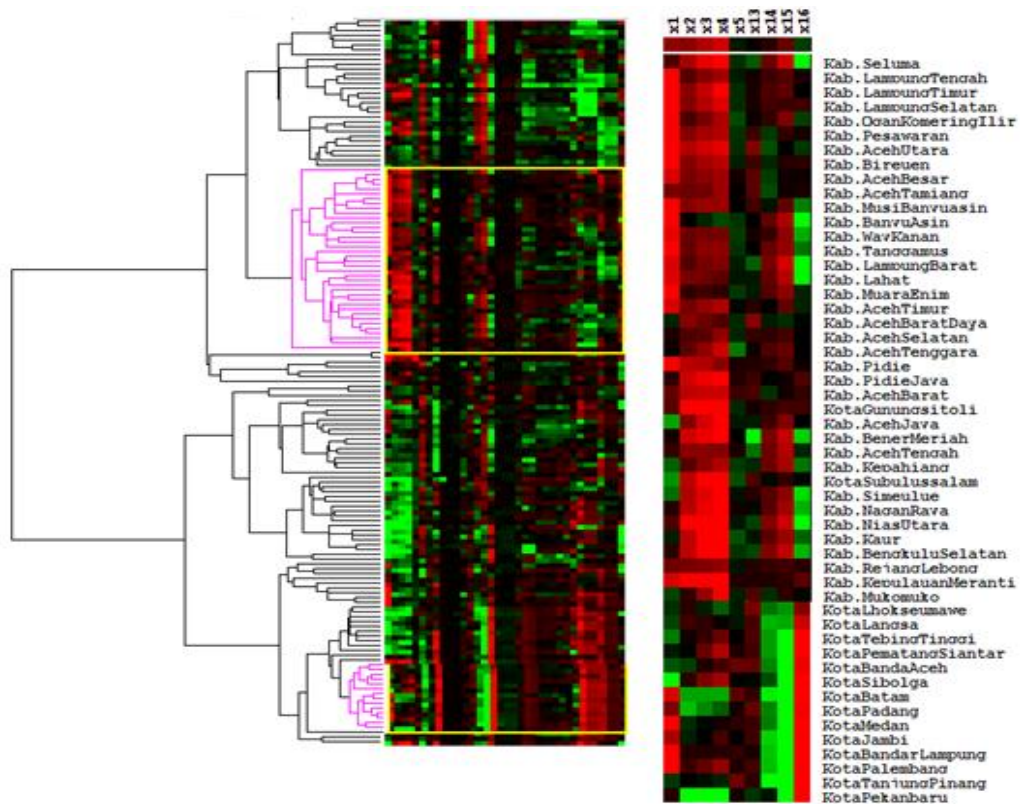
Komisi Kemiskinan Dunia (*The Poverty Commission*) menyatakan bahwa pengangguran merupakan penyebab utama kemiskinan. Pengangguran dapat menimbulkan berbagai dampak sosial bukan hanya terhadap si penganggur tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar. Aspek sosial kabupaten/kota di Sumatera terhadap aspek ketenagakerjaan berdasarkan analisis kelompok.

Berdasarkan Gambar 1 aspek ketenagakerjaan mempengaruhi aspek sosial, tingginya persentase penduduk miskin berumur ≥ 15 tahun yang tidak bekerja berdampak terhadap aspek sosial. Aspek sosial terdiri dari jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2) dan garis kemiskinan.

Tingginya persentase penduduk miskin yang berumur ≥ 15 tahun yang tidak bekerja mempengaruhi tingginya jumlah penduduk miskin di 25 kabupaten dan 27 kota di Pulau Sumatera. Tingginya jumlah penduduk berdampak terhadap persentase penduduk miskin, selain itu indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan diatas rata-rata atau tinggi.

Kabupaten yang penduduknya tidak bekerja atau menganggur tinggi yaitu terdapat di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Ogan Komering Ilir, Pesawaran, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Musi Banyuasin, Waykanan, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Kepahiang, Simeulue, Rejang Lebong, Kep. Meranti, Mukomuko, Karimun dan Bintan. Kota yang penduduknya menganggur yaitu Kota Gunungsitoli, Pangkal Pinang, Dumai, Payakumbuh, Bukittinggi, Metro, Binjai, Padang Panjang, Solok, Lubuk Linggau, Bengkulu, Lhokseumawe, Langsa, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Banda Aceh,

Sibolga, Batam, Padang, Medan, Jambi, Pinang, Prabumulih dan Sabang.
Bandar Lampung, Palembang, Tanjung



Gambar 1. Aspek sosial kabupaten/kota Sumatera terhadap aspek ketenagakerjaan

Sumber : data olahan, 2014

Keterangan : ■ diatas rata-rata, ■ sama dengan rata-rata, ■ dibawah rata-rata

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari 33 variabel diekstraksi dengan rotasi menghasilkan 32 variabel yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut, dimana 32 variabel masuk ke dalam 8 faktor dengan anggotanya masing-masing sebagai berikut :

a. Faktor 1 aspek ekonomi dengan variabel-variabel utama adalah pengeluaran perkapita/bulan untuk makan penduduk miskin, pengeluaran perkapita/bulan untuk makan penduduk tidak miskin, pengeluaran perkapita/bulan untuk makan penduduk miskin ditambah tidak miskin dengan pengaruh negatif. Aspek fasilitas

perumahan adalah rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama, rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama, dan rumah tangga miskin ditambah tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama berpengaruh positif.

b. Faktor 2 aspek kesehatan balita dengan variabel-variabel utama adalah balita yang mendapatkan imunisasi BCG, balita yang mendapatkan imunisasi DPT, balita yang mendapatkan imunisasi polio, balita yang mendapatkan imunisasi campak/morbili, dan balita yang mendapatkan imunisasi hepatitis B berpengaruh positif.

- c. Faktor 3 aspek ketenagakerjaan dengan variabel-variabel utama adalah penduduk miskin berumur ≥ 15 tahun yang bekerja di sektor pertanian berpengaruh negatif, penduduk miskin berumur ≥ 15 tahun yang bekerja bukan di sektor pertanian berpengaruh positif. Aspek fasilitas perumahan dengan variabel komponen utama rumah tangga miskin yang pengguna air bersih untuk minum, rumah tangga tidak miskin yang pengguna air bersih untuk minum, dan rumah tangga miskin ditambah tidak miskin yang pengguna air bersih untuk minum berpengaruh positif.
- d. Faktor 4 aspek sosial variabel-variabel utama ialah persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2) berpengaruh positif.
- e. Faktor 5 aspek pendidikan dengan variabel-variabel utama adalah angka partisipasi sekolah 7 sampai 12 tahun dengan pengaruh positif. Aspek kesehatan ibu variabel komponen utama adalah penolong persalinan pertama oleh tenaga kesehatan, dan penolong persalinan terakhir oleh tenaga kesehatan pengaruh positif.
- f. Faktor 6 aspek pendidikan dengan variabel-variabel utama adalah tidak mempunyai ijazah pengaruh negatif, mempunyai ijazah minimal SLTA, angka melek huruf 15 sampai 24 tahun, angka melek huruf 15 sampai 55 tahun, dan angka partisipasi sekolah 13 sampai 15 tahun berpengaruh positif.
- g. Faktor 7 aspek ketenagakerjaan dengan variabel-variabel utama adalah tidak bekerja pengaruh positif, bekerja di sektor informal pengaruh negatif. Aspek fasilitas perumahan variabel utama luas lantai perkapita 9 m^2 sampai 15 m^2 berpengaruh positif.
- h. Faktor 8 aspek sosial variabel-variabel utama adalah jumlah penduduk miskin pengaruh negatif. Aspek kesehatan ibu variabel komponen utama perempuan berumur ≥ 10 tahun berstatus kawin, cerai hidup atau cerai mati dan pernah/sedang menggunakan alat KB.
- Hasil dari *cluster* analisis menghasilkan pengelompokan 108 kabupaten/kota dari 151 kabupaten/kota di Sumatera yang dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan karakteristik sosial ekonomi dan kemiskinan kabupaten/kota di Pulau Sumatera.
- Kelompok 1 terdiri dari 7 kabupaten dengan indikasi yang menunjukkan kemiripan bahwa semakin tinggi (diatas rata-rata Sumatera) pada aspek pendidikan berdampak terhadap aspek ketenagakerjaan yang tinggi.
 - Kelompok 2 terdiri dari 9 kabupaten dengan indikasi yang menunjukkan kemiripan bahwa semakin rendah (dibawah rata-rata) aspek pendidikan berpengaruh terhadap aspek ekonomi yang semakin tinggi.
 - Kelompok 3 terdiri dari 36 kabupaten dan 2 kota dengan indikasi yang menunjukkan kemiripan bahwa semakin tinggi aspek ketenagakerjaan yang menganggur berdampak terhadap aspek ekonomi yang semakin tinggi.
 - Kelompok 4 terdiri dari 13 kabupaten dan 3 kota dengan indikasi yang menunjukkan kemiripan bahwa semakin rendah (dibawah rata-rata) pada aspek ekonomi berpengaruh terhadap aspek fasilitas perumahan yang semakin tinggi.
 - Kelompok 5 terdiri dari 2 kabupaten dan 27 kota dengan indikasi yang menunjukkan kemiripan bahwa semakin tinggi (diatas rata-rata Sumatera) pada aspek pendidikan berpengaruh terhadap semakin tingginya aspek fasilitas perumahan.

4.2. Saran

- Melihat masih adanya penduduk miskin disetiap pulau berdampak negatif terhadap kabupaten/kota di

masing-masing pulau tersebut. Apabila tidak segera dicari jalan keluarnya oleh masing-masing kabupaten/kota ini akan menyebabkan ketertinggalan antar daerah seperti kabupaten dengan kabupaten, kabupaten dengan kota yang masih dalam satu wilayah provinsi atau yang lebih buruknya lagi ketertinggalan kabupaten dengan kabupaten yang beda provinsi. Keadaan ini seharusnya tidak hanya menjadi tanggungan pemerintah pusat, seharusnya pemerintah daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya dengan tujuan untuk membangun daerahnya agar mampu bersaing dengan daerah lain dan tidak dipandang sebelah mata sebagai daerah yang belum mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Strategi penanggulangan kemiskinan ini adalah data kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota harus sesuai dengan keadaan yang *real* selama ini bukan tidak sampai atau tersalurkan dana kependuduk yang membutuhkan tetapi penerima dana yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Melihat penduduk miskin kabupaten/kota di Pulau Sumatera dengan klaster maka diharapkan kabupaten/kota yang memiliki persamaan di masing-masing aspek dapat saling membantu dan bertukar informasi untuk saling memajukan daerahnya. Harapan lain dari itu pemerintah pusat tidak bingung lagi daerah mana yang memiliki karakteristik yang sama dengan begitu penyerahan kewenangan untuk mensejahterakan penduduk di masing-masing kabupaten/kota bisa berjalan dengan baik dan yang lebih penting dana yang dikucurkan tidak disalahgunakan dengan adanya desentralisasi diharapkan dana daerah tidak semuanya masuk ke pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P., A.S. Alisjahbana, N. Effendi dan Boediono. 2002. **Daya Saing Daerah : Konsep dan Pengukurannya di Indonesia**. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2007, **Data dan Informasi Kemiskinan**, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2012, **Data dan informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2012**, Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2012, **Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia November 2012**, Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), **statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2011-2012**, Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Bappenas, 2004, **Rencana Strategik Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia**, Jakarta.
- BAPPENAS, 2010, **Appendices National Medium-term Development Plan (RPJM) 2010-2014**. Badan Perencana Pembangunan Nasional, Agency Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 5 of 2010.
- Indri, H. 2001. **Model Pengembangan Wilayah Dengan Pendekatan Agropolitan**. Tesis Program Pascasarjana IPB. Bogor
- Kementrian Komunikasi dan Informasi RI, 2011, **Program Penanggulangan**

**Kemiskinan Kabinet Indonesia
Bersatu II, Jakarta.**

Kurnia, D. 2012. **Analisis pembangunan daerah berdasarkan tipologi wilayah di Provinsi Riau.** Tesis Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru. (Tidak dipublikasikan).

Ravallion, M. 1998, **Poverty Lines in Theory and Practice : Living Standards Measurement Study,** World Bank : Working Paper No.13

Ruslan, R. 2006. **Metode Penelitian,** PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Rifai, A., F, Restuhadi. dan D, Widiatmoko. 2012, **Profil Kemiskinan di Indonesia.** Makalah SEMIRATA BKS-BTN Wilayah Barat. Pekanbaru.

Syarif, H. 2006. **Desentralisasi Untuk Pembangunan Daerah :** Dialog Kelompok Positivist dan Realistivist. Jentera, Edisi 14 – tahun IV, Oktober – Desember 2006. <http://isjd.pddii.lipi.go.id/admin/jurnal/406531.pdf> (akses 18 September 2013)

Suyanto, B. 1995, **Perangkap Kemiskinan : Problem & Strategi Pengentasannya,** Airlangga University Press. Surabaya.

World Bank Institute, 2005, **Introduction to Poverty Analysis : Poverty Manual.** World Bank Institute.

